

DAFTAR PUSTAKA

- Bebby, S. T. (2018). Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II. Makassar.
- Fathin, F. N. (2018). Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.
- Fahmi. (2018). Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governments.
- Kaban, Ita Ernala. 2009. Business Process Analysis: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer, Ultima InfoSys Vol 1 No. 1.
- Manalu, Deyendi Molore. 2017. Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam Mendukung Pelayanan Perbendaharaan Negara (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I). *Skripsi*. Medan
- Meinarsih, T., & Simanjuntak, B. H. (2014). Kepuasan Pengguna Layanan Pencairan Dana ABPN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. *Liquidity*, 3(2), 115-125.
- Nasution, N. L. (2019). Analisis Sistem Kerja Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat Ecobisma (*Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*), 6(1), 98-112
- Nugroho, Y. P., Basuki, B., & Fanani, Z. (2018). Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) dalam Proses Pencairan Dana Apbn pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 67-80.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
- Siagian, Sondang. P. 2015. Sistem Informasi Manajemen. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Alfabeta
- Syahdan, S. A., & Al Amjad, J. (2016). Analisis Proses Rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1).
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Wibowo, D. P., Rosidi, R., & Purwanti, L. (2018). Determinan Kepuasan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 108-120.